

**PENGARUH KARAKTERISTIK TUJUAN ANGGARAN,*GOOD GOVERNANCE*, DAN PENGAWASAN APIP TERHADAP KINERJA APARAT PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BENGKALIS**

**Oleh:**

**Indah Syurgawi**

**Pembimbing: Restu Agusti dan Al Azhar. A**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*

Email: [indah.syurgawi02@gmail.com](mailto:indah.syurgawi02@gmail.com)

*The Effect Of Budget Characteristics Purpose, Good Governance and Oversight APIP Authorities to Performance of Regency Bengkalis*

**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the effect of budget participation, budget goal clarity, feedback, budget evaluation, good governance and oversight APIP the performance of local government officials Bengkalis. This research is a survey research. Where the data obtained from questionnaires distributed to respondents. Data distributed and collected by purposive sampling technique. The sample used in this study is the head of the public, personnel and chief financial officer of each department in Bengkalis with a total of 90 respondents. The type of data used are primary data collection method of data using questionnaires. Data analysis method used in this study is multiple regression with SPSS version 21. The results showed that the performance of local government officials does not affect the implementation of good governance. Local financial management affect the implementation of good governance. Internal control systems of government affect the implementation of good governance. Based on the calculation of the coefficient of determination (R<sup>2</sup>) obtained a value of 0,711. This shows that the influence of the independent variables on the dependent 71.1% and the remaining 28.9% influenced by other variables.*

*Keywords: Budget, Characteristics, Good Governance, Oversight APIP Authorities, Local Government, and Performance.*

**PENDAHULUAN**

Kinerja aparatur pemerintah daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran/tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah

daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi aparatur pemerintah (Wardani, 2010). Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan pemerintah yang bersih

diperlukan pelaku birokrasi pemerintah yang profesional, melaksanakan tugas dilandaskan pada landasan normatif dan kepatutan sebagai etika yang mengendalikan setiap langkah pelaksanaan tugas, wewenang maupun kekuasaan yang dipercayakan kepadanya (Surjadi, 2009:34).

Karakteristik tujuan anggaran merupakan determinan utama yang melekat pada sistem anggaran agar anggaran dapat diterima untuk berbagai pelaksanaan anggaran. Salah satu maksud yang terkandung dalam karakteristik anggaran merupakan upaya untuk meningkatkan keberhasilan anggaran menjadi lebih akurat, sehingga pengendalian, yang akan dilakukan dapat lebih terkendali. Dengan adanya karakteristik tujuan anggaran dapat meningkatkan kinerja aparat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam perencanaan anggaran, ada beberapa karakteristik tujuan anggaran. Menurut Kenis (1979) karakteristik tujuan anggaran ada lima, yaitu partisipasi anggaran (*budgetary participation*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*), dan kesulitan tujuan anggaran (*budget goal difficulty*).

*Good Governance* adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang pola sikap dan pola tindak pelakunya dilandasi prinsip-prinsip dan karakteristik tertentu (Mardiasmo, 2004). Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan *good governance* berarti penyelenggaraan negara tersebut berdasarkan diri pada prinsip-prinsip partisipasi, pemerintahan

berdasarkan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Dengan adanya pemahaman atas *good governance* yang baik, maka aparat pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerjanya.

Pengawasan oleh APIP merupakan bagian penting dalam praktik pengawasan pemerintahan di Indonesia. Lembaga-lembaga yang berwenang melakukan fungsi sistem pengendalian internal di Indonesia disebut Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dimana nantinya dengan adanya pengawasan oleh APIP akan lebih meningkatkan kinerja aparat, semakin tinggi pengawasan, maka akan semakin baik kinerja aparat tersebut, dan semakin terarah sesuai visi dan misi yang akan dicapai.

Pemerintah yang baik dan bersih dapat diukur dari *performance* aparturnya. Di Kabupaten Bengkalis efektivitas kinerja aparat belum maksimal. Berdasarkan Siaran Pers (2013) dari Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Provinsi Riau, menjelaskan bahwa pada LKPD Kabupaten Bengkalis ditemukan permasalahan terkait kelemahan Sistem Pengendalian Intern, diantaranya adalah (1) Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2013 Terlambat

Disetorkan ke Kas Daerah; (2) Penyajian Piutang Pajak Daerah Kabupaten Bengkalis Tidak Sesuai dengan SAP; (3) Peme-rintah Daerah Kabupaten Beng-kalis Tidak Memperoleh Potensi Penda-patan Bunga atas Penempatan Dana Kas Daerah dan Dana Cadangan yang tidak sesuai Ketentuan; 4) Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bengkalis Belum Tertib; 5) Penerima Hibah Tahun Anggaran Tahun 2013 belum Menyerahkan SPJ hibah sebesar dan Sebagian tidak dapat diyakini Kewajarannya; dan 6) Persiapan Pe-merintah Kabupaten Bengkalis Menuju Penerapan Laporan Keuangan Berbasis AkruaI Belum Memadai. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa kinerja Aparat Pemerintah Kabupaten Bengkalis belum bisa dikatakan baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh *Budgetary Goal Characteristics* Terhadap Sikap Aparat Dalam Menilai Kinerja Pemerintah Daerah” (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Palangka Raya) oleh Masiyah Kholmi dan Mia Milayanti (2012).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini sama dengan penelitian sebelumnya, variabel inde-penden yaitu karakteristik tujuan anggaran. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini menam-bahkan dua variabel yaitu *good governance* yang diadopsi dari peneli-tian Prisma Yuda (2012) yang berjudul “Pengaruh *Good Gove-rence*, Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah”. Serta menam-bahkan variabel pengawasan APIP yang diadopsi dari penelitian Indah Wulandari (2013) “Pengaruh Penga-wasan Fungsional Dalam Menunjang

Akuntabilitas Publik Pada Pemerin-tahan Kota Padang”.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Apakah partisipasi anggaran ber-pengaruh terhadap kinerja Aparat Pe-merintah Daerah Kabupaten Beng-kalis? 2) Apakah kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kiner-ja Aparat Pemerintah Daerah Kabu-paten Bengkalis? 3) Apakah umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis? 4) Apakah evaluasi anggaran ber-pengaruh terhadap kinerja Aparat Pe-merintah Daerah Kabupaten Beng-kalis? 5) Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Beng-kalis? 6) Apakah pengawasan APIP berpengaruh terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Beng-kalis?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 2) Untuk menguji pengaruh kejelasan tujuan anggaranterhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 3) Untuk menguji pengaruh umpan balikterhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Beng-kalis. 4) Untuk menguji pengaruh evaluasi anggaran terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 5) Untuk menguji pengaruh *good governance* terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 6) Untuk menguji pengaruh pengawasan APIPterhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 1) Bagi penulis, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang pengaruh karakteristik tujuan anggaran, *good governance* dan pengawasan APIP terhadap kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis. 2) Bagi Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini Dinas-Dinas dan Badan-Badan di Kabupaten Bengkalis dapat menjadi masukan dalam peningkatan kinerja aparat pemerintah daerah dengan memperhatikan pengaruh karakteristik tujuan anggaran, *good governance* dan pengawasan APIP. 3) Menyediakan informasi yang mungkin diperlukan untuk penelitian di bidang akuntansi sektor publik pada masa yang akan datang.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah

Aparatur pemerintah yang profesional adalah aparatur yang memiliki kemampuan pelaksanaan tugas berdasarkan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan mendasarkan pada etika profesi, mengembangkan kemampuan pengendalian diri (*self control*) dan berorientasi pada kualitas kinerja dengan cara kerja yang efisien, efektif dan ekonomis memiliki kepekaan yang tinggi terhadap kepentingan masyarakat dan masalah-masalah masyarakat serta melaksanakan kewajiban memberikan pertanggungjawaban atas setiap kegiatan yang dilaksanakan (Surjadi, 2009:36).

Untuk mengukur variabel kinerja aparatur dalam pelayanan publik Mahoney (1963) dalam Dhiza (2014) mengembangkan instrumen

yang dijadikan indikator-indikator dalam mengukur kemampuan aparat. Pengukuran ini terdiri dari satu dimensi keseluruhan kinerja ditambah delapan subdimensi yaitu *planning, investing, coordinating, evaluating, supervising, staffing, negotiating*, dan *representing*.

### Karakteristik Tujuan Anggaran

Karakteristik anggaran merupakan determinan utama yang melekat pada sistem anggaran dapat diterima untuk berbagai pelaksanaan anggaran. Salah satu maksud yang terkandung dalam karakteristik anggaran merupakan upaya untuk meningkatkan keberadaan anggaran menjadi lebih akurat, sehingga pengendalian yang akan dilakukan dapat lebih terkendali. Dalam perencanaan anggaran, ada beberapa karakteristik tujuan anggaran. Menurut Kenis (1979) karakteristik tujuan anggaran ada lima, yaitu partisipasi anggaran (*budgetary participation*), kejelasan tujuan anggaran (*budget goal clarity*), umpan balik anggaran (*budgetary feedback*), evaluasi anggaran (*budgetary evaluation*), dan kesulitan tujuan anggaran (*budget goal difficulty*).

### Penerapan Good Governance

Didalam lampiran PermenPAN No. 13 tahun 2009 *good governance* adalah konsep pengelolaan pemerintahan yang menekankan pada pelibatan unsur pemerintah, masyarakat dan swasta secara proporsional sebagai tiga pilar utama. Konsep inilah yang memberi garis dasar bahwa siapa pun yang berperan dan peran apapun yang dijalankan dalam penyelenggaraan pemerintahan dituntut untuk lebih berorientasi ke pelayanan publik yang

semakin baik. Dengan kata lain, tidak ada pemerintahan yang dapat disebut lebih atau semakin baik jika tidak ada bukti bahwa pelayanan publik semakin baik dan semakin berkualitas.

Menurut dokumen ESCAP (9), *good governance* mempunyai 8 (delapan) karakteristik utama: ia bersifat partisipatif, *rule of law*, keterbukaan, responsif, berorientasi konsensus, kesetaraan dan membela yang lemah, efektif dan efisien dan akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan fokus yang sentral, juga selalu disertai oleh keterbukaan (*transparency*) dan menerapkan undang - undang ( *rule of law*) (Surjadi, 2009:19).

### **Pengawasan APIP**

Dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengendalikan kegiatan pemerintah dalam rangka mencapai pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Adapun unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah menurut Peraturan Pemerintah No-mor 60 Tahun 2008 adalah lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, infor-

masi dan komunikasi, dan pemantauan.

### **Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis**

#### **Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda**

Partisipasi dalam penyusunan anggaran juga dapat mempengaruhi kinerja aparat pemerintah, karena adanya partisipasi dalam penyusunan anggaran, maka aparat pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran. Sehingga diharapkan aparat pemerintah dapat melaksanakan anggaran dengan lebih baik dan pada akhirnya bisa meningkatkan kinerja aparat pemerintah..(Murthi dan Sujana, 2008).

Hasil penelitian Munawar (2006), Istiyani (2009), dan wulandari (2010) menunjukkan bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat pemda. Erwati (2009) juga menemukan bahwa partisipasi penyusunan Anggaran berbasis Kinerja (ABK) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja kepala SKPD pemda. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan ABK, maka akan semakin meningkatkan kinerja kepala SKPD Pemda. Semakin tinggi tingkat keterlibatan para aparatur dalam proses penyusunan anggaran, maka semakin baik pula hasil kerjanya.

**H1 : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis .**

## **Pengaruh Kejelasan Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda.**

Kejelasan sasaran anggaran mencerminkan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara spesifik dan jelas sehingga dapat dipahami oleh orang yang bertanggung jawab dalam pencapaiannya. Apabila sasaran tidak disebutkan secara spesifik akan menyebabkan kebingungan yang akan berdampak buruk terhadap kinerja (murthi dan sujana, 2008). Dengan demikian, kejelasan anggaran akan mempermudah aparat pemerintah daerah dalam menyusun anggaran untuk mencapai target-target anggaran yang telah ditetapkan. Sehingga diperlukan peran aparat pemerintah dalam penyusunan sasaran anggaran dengan harapan kinerja aparat pemerintah akan meningkat (Arifin : 2007)

Penelitian Munawar(2006) didukung oleh Penelitian Istiyani (2009) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel kejelasan tujuan anggaran terhadap variabel kinerja aparat Pemda. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi kinerja aparat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya jika tujuan anggaran kurang jelas maka kinerja aparat Pemda juga akan turun.

**H2:Kejelasan tujuan anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis .**

## **Pengaruh Umpan Balik Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda**

Umpan balik anggaran sebagai karakteristik lain memiliki maksud bahwa adanya komunikasi

informasi mengenai rencana dan hasil yang dicapai. Secara formal umpan balik ini diwujudkan dalam laporan prestasi kerja. Laporan prestasi kerja umumnya disampaikan segera setelah pelaksanaan berakhir, dengan maksud agar aparat pemerintah yang bersangkutan tidak melakukan kesalahan yang sama. Umpan balik anggaran berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Hal ini berarti semakin tinggi umpan balik yang diterima aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya jika umpan balik anggaran yang sedikit maka akan melemahkan dan menurunkan kinerja aparat pemerintah daerah (Istiyani,2009).

Menurut Istiyani (2009) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan variabel umpan balik anggaran terhadap variabel kinerja aparat pemda. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi umpan balik yang diterima aparat Pemda, maka semakin tinggi kinerja aparat pemda dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sebaliknya jika umpan balik anggaran yang sedikit akan melemahkan kinerja dan kinerja aparat pemda juga akan turun.

**H3: Umpan balik anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis .**

## **Pengaruh Evaluasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemda**

Dengan membandingkan antara rencana dengan realisasinya evaluasi anggaran akan mampu memberikan bantuannya terhadap pencapaian anggarannya agar efektif dan rencana, maka aparat pemerintah

daerah lebih mengetahui langkah apa yang akan mereka perbaiki . Evaluasi anggaran bukan saja untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pelaksanaan, akan tetapi lebih jauh dari itu, dimaksudkan untuk menilai kembali apakah anggaran yang ditetapkan sudah mencerminkan kemampuan dan kelemahan yang dimiliki organisasi serta kesempatan dan ancaman yang dihadapi oleh aparat pemerintah daerah.

Munawar (2006) menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh terhadap perilaku aparat pemerintah daerah Kabupaten Kupang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menyiapkan anggaran mereka selalu melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi kegiatan-kegiatan yang telah diprogramkan dan pada pelaksanaan anggaran, mereka juga melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang telah dilakukan sehingga kinerja mereka menjadi lebih baik. Wulandari (2010) juga menemukan bahwa evaluasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparat Pemda Kota Pekanbaru.

**H4: Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis .**

#### **Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Aparat Pemda**

Good Governance merupakan semboyan yang sedang gencar-gencarnya dipromosikan oleh pemerintah. Semboyan tersebut adalah hal yang sangat didambakan oleh sektor baik public maupun swasta, mengingat efek dominan

yang banyak didapatkan dari *good governance* itu sendiri. Mewujudkan konsep *good governance* dapat dilakukan dengan mencapai keadaan yang baik dan sinergi antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat sipil dalam pengelolaan sumber-sumber alam, social, lingkungan dan ekonomi. Prasyarat minimal untuk mencapai *good governance* adalah adanya transparan, efektif dan efisien, serta mampu menjawab ketentuan dasar keadilan. Sebagai bentuk penyelenggaraan negara yang baik maka harus ada keterlibatan masyarakat di setiap jenjang proses pengambilan keputusan (Agus Dwiyanto, 2008).

Menurut Aprilia (2008) menyatakan bahwa *good governance* mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja aparat sektor publik. Menurut Prima Yuda (2012) menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Hal ini berarti semakin tinggi pemahaman aparat terhadap *good governance* maka akan lebih mudah mengimplementasikannya dalam organisasi tersebut. Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut:

**H5: *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis .**

#### **Pengaruh Pengawasan APIP Terhadap Kinerja Aparat Pemda**

Pengawasan yang dilakukan lembaga pengawasan internal pemerintah merupakan bagian dari fungsi manajemen pemerintahan. Untuk itu dibentuk lembaga yang bertanggung jawab kepada presiden untuk menjamin semua

proses ma-najemen penyelenggaraan pe-merintahan negara, pengawasan APIP sangat dibutuhkan demi mendukung terselenggaranya ke-giatan pemerintahan yang efisien dan efektif, serta mengeliminasi praktik-praktik KKN.

Andhika Ardiansyah (2010) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat) menunjukkan hasil yang sama bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Indah Wulandari (2013) menunjukkan hasil bahwa pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas public pada pemerintahan Kota Padang. Argumen ini mengarah pada perumusan hipotesis berikut:

**H6 : Pengawasan APIP berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis .**

## **METODE PENELITIAN**

### **Populasi dan sampel Penelitian**

Menurut Sugiyono (2012:115), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sampel adalah satuan prosedur pengambilan data, dimana hanya sebagian populasi saja yang diambil dan dipergunakan untuk menentukan sifat serta ciri yang dikehendaki dari suatu populasi (Siregar, 2013).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh badan dan

dinas Kabupaten Bengkalis, yang berjumlah 30. Adapun metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *purposive sampling*, yaitu pe-milihan sampel menggunakan kriteria bahwa anggota populasi yang menjadi sampel adalah Pejabat Pembuat Komite (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada badan dan dinas Kabupaten Bengkalis. Sehingga responden keseluruhan berjumlah 90 orang.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Prosedur pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pengumpulan data primer, yaitu kuisisioner. Kuisisioner yang telah terstruktur dibagi secara langsung kepada responden untuk diisi. Seluruh kuisisioner terdiri dari 90 buah akan dibagikan ke Pejabat Pembuat Komite (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada badan dan dinas Kabupaten Bengkalis.

### **Analisis Regresi Linear Berganda**

Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur kekuatan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut.

Pengujian tersebut didasarkan pada persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 + e$$

Keterangan:

Y = penerapan kinerja aparat

a = konstanta

$\beta_1$  = koefisien regresi untuk variabel independen partisipasi anggaran

$\beta_2$  = koefisien regresi untuk variabel independen kejelasan tujuan anggaran

- $\beta_3$  = koefisien regresi untuk variabel independen umpan balik anggaran
- $\beta_4$  = koefisien regresi untuk variabel independen evaluasi anggaran
- $\beta_5$  = koefisien regresi untuk variabel independen *good governance*
- $\beta_6$  = koefisien regresi untuk variabel independen pengawasan APIP
- $X_1$  = kinerja aparatur pemerintah daerah
- $X_2$  = pengelolaan keuangan daerah
- $X_3$  = sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)
- $X_4$  = kinerja aparatur pemerintah daerah
- $X_5$  = kinerja aparatur pemerintah daerah
- $X_6$  = kinerja aparatur pemerintah daerah
- $e$  = kesalahan pengganggu (error)

### Uji Kualitas Data

#### Uji Validitas

Uji validitas atau kesahihan menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin di ukur (Siregar, 2013). Uji validitas dapat dilakukan dengan melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk Apabila dari tampilan output SPSS menunjukkan bahwa ko-relasi antara masing-masing indikator terhadap total skor konstruk me-nunjukkan hasil yang signifikan, dapat disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid.

#### Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah uji yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama

pula (Siregar, 2013). ). Suatu kuisisioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang dalam kuisisioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu.

Pengujian reabilitas alat ukur *internal consistency*, dilakukan dengan cara mencoba alat ukur cukup hanya sekali saja, kemudian data yang diperoleh di analisis dengan teknik tertentu (Siregar, 2013). SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *AlphaCronbach (a)*. *Alpha Cronbach* digunakan untuk menghitung reabilitas suatu tes yang mengukur sikap atau perilaku.

#### Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data distribusi normal atau tidak (Siregar, 2013). Bila data distribusi normal, maka dapat di-gunakan statistik parametrik. Sedangkan bila tidak berdistribusi normal, maka digunakan uji statistik non parametrik. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

#### Uji Asumsi Klasik

##### Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variable-variabel bebas (Ghozali, 2011). Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Faktor (VIF)*. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *tolerance* < 0,10 atau sama dengan nilai *VIF* > 10 (Ghozali, 2011).

### Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain atau untuk melihat penyebaran data. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terdapat heteroskedastisitas.

Uji ini dapat dilakukan dengan melihat gambar plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila dalam grafik tersebut tidak terdapat pola tertentu yang teratur dan data tersebar secara acak di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali,2011).

### Uji Autokorelasi

Menguji autokorelasi dalam suatu model bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu pada periode sebelumnya. Metode Durbin Watson *test* hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*frist order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara variabel independen (Imam Ghozali, 2011). Secara umum jika angka D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi ini

digunakan karena dapat menjelaskan kebaikan dari model regresi dalam memprediksi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali,2011).

### Uji Hipotesis

Menurut Praiyatno (2012) dalam Herwika (2015) pengujian hipotesis satu, dua, dan tiga dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriterianya adalah apabila  $t_{hitung} > t_{table}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, dan sebaliknya apabila  $t_{hitung} < t_{table}$ , maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## HASIL PENELITIAN

### Hasil Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Nilai r tabel dapat dilihat pada tabel r dengan persamaan  $N-2 = 81-2 = 79 = 0,219$ . Pengujian pertama untuk uji validitas dilakukan untuk menguji variabel kesiapan pemerintah daerah.

Dari hasil pengujian yang dilakukan diketahui bahwa nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$  sehingga semua item pertanyaan untuk semua variabel dapat dikatakan valid.

#### b. Uji Reliabilitas

Dilihat dari hasil pengujian menunjukkan bahwa besarnya *Cronbach Alpha* pada seluruh

variabel baik variabel Kinerja aparat pe-merintah daerah, Partisipasi anggaran, kejelasan tujuan anggaran, Umpan balik anggaran, evaluasi anggaran, Good governance dan Pengawasan APIP lebih besar 0,60 sehingga dikatakan reliabel.

### Hasil Uji Normalitas

Dengan melihat tampilan grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah pe-nyebarannya mengikut arah garis diagonal. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

### Hasil uji Asumsi Klasik

#### Uji Multikolinearitas

Dari hasil perhitungan analisis data , diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas  $< 10$  dan tolerance  $> 0,10$ . Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

#### Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil perhitungan analisis data diketahui nilai  $d_{hitung}$  (Durbin Watson) terletak antara  $-2$  dan  $2 = -2 < 1,794 < 2$ .Dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi.

#### Uji Heteroskedastisitas

Dari gambar *Scatterplot* terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

### Hasil Pengujian Hipotesis

Penelitian ini menggunakan Model regresi berganda dengan hasil sebagai berikut:

- Nilai konstanta (a) sebesar 0,459. Artinya adalah apabila variabel

independen diasumsikan nol (0), maka kinerja aparat PEMDA bernilai 0,459.

- Nilai koefisien regresi variabel partisipasi anggaran sebesar 0,167. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan partisipasi anggaran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja aparat PEMDA sebesar 0,167 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel kejelasan tujuan anggaran sebesar 0,054. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan kejelasan tujuan anggaran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja aparat PEMDA sebesar 0,054 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel umpan balik sebesar 0,042. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan umpan balik sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja aparat PEMDA sebesar 0,042 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel evaluasi anggaran sebesar 0,244. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan evaluasi anggaran sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja aparat PEMDA sebesar 0,244 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel good governance sebesar 0,225. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan good governance sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja aparat PEMDA sebesar 0,225 dengan asumsi variabel lain tetap.
- Nilai koefisien regresi variabel pengawasan APIP sebesar 0,093. Artinya adalah bahwa setiap peningkatan pengawasan APIP

sebesar 1 satuan maka akan meningkatkan kinerja aparat PEMDA sebesar 0,093 dengan asumsi variabel lain tetap.

- Standar error ( $e$ ) merupakan variabel acak dan mempunyai distribusi probabilitas yang mewakili semua faktor yang mempunyai pengaruh terhadap  $Y$  tetapi tidak dimasukkan dalam persamaan.

Adapun hasil dari pengujian analisis regresi berganda dalam menguji hipotesis adalah sebagai berikut:

**a. Hipotesis 1 : Partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.18 didapat nilai  $t_{hitung}$  senilai (2,515) dan  $p$  value senilai (0,014). Diketahui nilai  $t_{tabel}$  pada taraf signifikansi 5 % (2-tailed) dengan Persamaan =  $n - k - 1 : \alpha / 2 = 81 - 6 - 1 : 0,05 / 2 = 74 : 0,025 = 1,993$ . Dengan demikian diketahui  $t_{hitung}$  (2,241)  $>$   $t$  tabel (1,993) dan Sig. (0,028)  $<$  0,05.. Maka dapat disimpulkan  $H_1$  diterima yaitu variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah. Artinya dengan adanya partisipasi dalam pe-nyusunan anggaran, maka aparat pemerintah merasa terlibat dan harus bertanggung jawab dalam pelaksanaan anggaran.

**b. Hipotesis II :Kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.**

Dengan demikian diketahui  $t_{hitung}$  Kejelasan tujuan anggaran. Diketahui  $t$  hitung (0,430)  $<$   $t$  tabel (1,993) dan Sig. (0,669)  $>$  0,05. Maka dapat disimpulkan  $H_2$  ditolak yaitu variabel kejelasan tujuan anggaran tidak ber-pengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Artinya ke-jelasan tujuan anggaran yang ada pada aparat pemerintah daerah di Kabupaten Bengkalis tidak me-nunjukkan tujuan anggaran yang dinyatakan secara spesifik dan jelas dan dimengerti oleh siapa saja yang bertanggung jawab.

**c. Hipotesis III: Umpan balik anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.**

Dengan demikian diketahui  $t_{hitung}$  (0,334)  $<$   $t$  tabel (1,993) dan Sig. (0,739)  $>$  0,05. Maka dapat disimpulkan  $H_3$  ditolak yaitu variabel Umpan balik tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah artinya bahwa rendahnya umpan balik yang diterima aparat pemerintah daerah sehingga rendah pula kineja aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

**d. Hipotesis IV: Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.**

Dengan demikian diketahui  $t_{hitung}$  (2,518)  $>$   $t$  tabel (1,993) dan Sig. (0,014)  $<$  0,05. Maka dapat disimpulkan  $H_4$  diterima yaitu Evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat

pemerintah daerah artinya dengan mem-bandingkan antara rencana dengan realisasinya evaluasi anggaran akan mampu memberikan ban-tuannya terhadap pencapaian anggarannya agar efektif.

**e. Hipotesis V: Good governance berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.**

Dengan demikian diketahui  $t_{hitung} ((5,736) > t \text{ tabel } (1,993)$  dan  $\text{Sig. } (0,000) < 0,05..$  Maka dapat disimpulkan  $H_5$  diterima yaitu good governance berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah artinya semakin baik pemahaman mengenai good governance aparat pemerintah dalam bekerja maka akan semakin mempengaruhi dan memberikan dampak peningkatan terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.

**f. Hipotesis VI: Pengawasan APIP berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah.**

Dengan demikian diketahui  $t_{hitung} (2,119) > t \text{ tabel } (1,993)$  dan  $\text{Sig. } (0,037) < 0,05$  Maka dapat disimpulkan  $H_6$  diterima yaitu pengawasan APIP berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah artinya dengan pengawasan dan pengendalian yang baik oleh aparat intern yang ada pada pemerintah daerah bisa meningkatkan kualitas dalam meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah tersebut.

**c.) Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)**

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan dan disajikan pada tabel 4.19, diperoleh nilai koefisien

determinasi sebesar diketahui nilai Adjusted R Square sebesar 0,711. Artinya adalah bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 71,1 %. Sedangkan sisanya 28,9 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dan pengujian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa variabel partisipasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis..
2. Bahwa variabel kejelasan tujuan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis, .
3. Bahwa variabel Umpan balik tidak berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis
4. Bahwa variabel evaluasi anggaran berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis..
5. Bahwa variabel pengawasan APIP berpengaruh terhadap kinerja aparat pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis.

### **Keterbatasan Penelitian**

1. Pengumpulan data melalui kuesioner dibutuhkan waktu dan tenaga yang memadai untuk mengirim ke responden terpilih. Beberapa responden tidak mengembalikan jawaban kuesioner, demikian juga waktu pengembalian tidak

dapat ditentukan. Hal ini berdampak pada jumlah data penelitian yang dapat diperoleh belum maksimal.

2. Besarnya pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen hanya 71,1 %.. Hal ini menunjukkan masih terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja aparat pemerintah daerah.

### Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil penelitian diatas dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkalis dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan:
  - a. Pimpinan SKPD harus mulai membahas langkah-langkah yang akan ditempuh untuk mengatasi kendala yang dihadapi oleh kinerja aparat pemerintah daerah.
  - b. Melakukan perekrutan atau penerimaan pegawai dengan mempertimbangkan tingkat dan latar belakang pendidikan khususnya yang berkaitan dengan lingkup tugas pe-ngelolaan keuangan daerah,
  - d. Menempatkan pegawai pada posisi atau lingkup tugas yang sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing sehingga dapat lebih memahami dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugasnya.
2. Bagi penelitian selanjutnya
  1. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan supaya

dapat lebih mengembangkan dan memperluas lingkup penelitian sehingga dapat lebih mengungkap fenomena yang terjadi di pemerintahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. Penelitian selanjutnya dapat mengganti objek penelitian ke lingkup yang lebih luas (pemerintah pusat) atau lingkup di daerah lain yang berbeda karakteristiknya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy. 2008. Penganggaran Partisipatif Di Pemerintahan dan Bisnis :Perbedaan dan Isu-Isu Penelitian. **Syukriy.wordpress.com**. (Dilayari 25 Desember 2008)
- Agus Dwiyanto, Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008
- Ardiansyah, Andika. 2010. *Pengaruh Pengawasan Fungsional Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Pada Inspektorat Propinsi Jawa Barat)*. **Skripsi**. UNIKOM. Bandung. (Tidak dipublikasikan)
- Ghozali, Imam. 2011, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, badan. Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

- Istiyani. 2009. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Tamanggung). **Tesis** Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Kenis, Izzetin. 2012. *Effect of Budgetary Goal Characteristic on Managerial Attitudes and Performance*. **The Accounting Review**. No.4.October.pp.707-721.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Munawar,2006. Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Terhadap Perilaku,Sikap dan Kinerja Aparat Pemerintah Daerah di Kabupaten Kupang.**Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang.K-ASSP 02**.
- Murthi, dkk. 2006. Pengaruh Budgetary Goal Characteristics Terhadap Kinerja Manajerial Pada Rumah Sakit Pemerintah di Kota Denpasar. **Tesis** Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar.
- Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern
- Permendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Jakarta.
- Siregar. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*.
- Surjadi. 2009. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Wardani, Kiki. 2010. Pengaruh Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Pelaksanaan *Good Governance*.Skripsi. UNP. Pa-dang.